

**Nama: Najwa Ayudia Aura Rachim**

**NPM: 2313031027**

**Kelas: A**

**Matkul: Ekonomi Pendidikan (UAS)**

---

### **Jawaban Soal Nomer 1**

1. Pembangunan pendidikan tidak bisa hanya diukur dari jumlah gedung yang berdiri megah, tetapi dari seberapa baik proses pembelajaran berlangsung di dalamnya. Dalam kasus Kabupaten A yang mengalokasikan 30% APBD untuk pendidikan namun sebagian besar digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, terlihat jelas adanya ketidakseimbangan antara efisiensi internal dan eksternal dalam pengelolaan anggaran pendidikan tersebut.

- Efisiensi internal mengacu pada Kabupaten A menunjukkan efisiensi administratif karena banyak dana dikeluarkan untuk pembangunan gedung sekolah dan angka partisipasi meningkat, namun efisiensi internal rendah karena investasi pada komponen yang langsung memengaruhi mutu pembelajaran seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan media pembelajaran digital sangat terbatas. Akibatnya, setelah lima tahun kualitas hasil belajar siswa tidak meningkat signifikan, gedung baru tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pendidik dan materi pembelajaran. Anggaran pendidikan harus difokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran, bukan hanya pemenuhan administrasi atau infrastruktur, karena tanpa penguatan kompetensi pedagogik guru dan kurikulum, investasi fisik tidak akan menghasilkan efisiensi pedagogis.
- efisiensi eksternal mengacu pada Kabupaten A yang mengalokasikan 30% APBD untuk pendidikan lebih tinggi dari ambang minimum terancam karena rendahnya kualitas pembelajaran membuat lulusan kurang relevan dengan kebutuhan pasar dan masyarakat, sehingga investasi pendidikan memberikan dampak ekonomi dan sosial yang kecil, masalahnya terletak pada alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran (lebih fokus pada fisik) daripada jumlah dana.

2. Kebijakan penganggaran yang lebih memprioritaskan pembangunan gedung daripada investasi pada guru dan kurikulum menyebabkan stagnasi kualitas SDM di Kabupaten A terlihat dari rendahnya kompetensi pedagogik guru, kurikulum yang tidak relevan, keterbatasan adopsi teknologi digital, dan menurunnya hasil asesmen seperti Rapor Mutu Pendidikan dan ANBK yang pada jangka panjang menurunkan daya saing daerah dan menghambat pertumbuhan ekonomi oleh karena itu direkomendasikan pengalihan proporsi anggaran untuk meningkatkan kapasitas guru (40–50%), pengembangan kurikulum dan media digital (20–30%), serta menerapkan penganggaran berbasis kinerja, program pelatihan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur digital, evaluasi berkala menggunakan indikator mutu, dan

prioritisasi pembangunan fisik hanya untuk daerah sangat membutuhkan, agar anggaran pendidikan 30% APBD efektif menghasilkan lulusan kompeten dan mendukung pembangunan daerah.

## **Jawaban Soal Nomer 2**

**1.** Kasus tersebut menunjukkan ketimpangan pendidikan berbasis geografis antara perkotaan dan pedesaan yang melanggar prinsip pemerataan pendidikan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Ketimpangan ini dalam tiga dimensi yaitu

- 1) ketidaksetaraan infrastruktur dan fasilitas sekolah perkotaan dilengkapi laboratorium dan internet cepat sementara sekolah desa kekurangan sarana dasar
- 2) ketimpangan kualitas tenaga pendidik sekolah kota memiliki guru profesional sedangkan desa mengalami kekurangan guru berkualitas
- 3) ketimpangan hasil belajar nilai ujian siswa di desa secara signifikan lebih rendah dibandingkan siswa kota. Kondisi ini bersifat struktural dan disebabkan oleh distribusi anggaran yang tidak merata, kebijakan penempatan guru yang tidak adil, dan investasi infrastruktur yang terpusat di perkotaan, sehingga mencerminkan kegagalan administrasi negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional menjamin pemerataan kesempatan dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah NKRI.

**2.** Ketimpangan pendidikan antara kota dan desa memiliki dampak ekonomi jangka panjang yang serius karena dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja, memperlebar kesenjangan pendapatan antarwilayah, menghambat mobilitas sosial, serta memperkuat kemiskinan struktural. Selain itu, ketimpangan pendidikan juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang pendidikan berkualitas dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan melemahkan daya saing nasional di era ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi

### **Jawaban Soal Nomer 3**

1. Pengangguran terdidik dalam kasus tersebut disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kompetensi yang diperoleh selama pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum perguruan tinggi mungkin belum mampu mengikuti perkembangan teknologi, industri, dan tuntutan pasar kerja yang terus berubah. Selain itu, lulusan sering kali memiliki kemampuan teoritis yang baik, tetapi kurang memiliki keterampilan praktis, pengalaman kerja, kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta penguasaan teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Akibatnya, produktivitas yang diharapkan dari investasi pendidikan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh dunia industri, sehingga banyak lulusan mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya.

2. Pendidikan dan pasar kerja memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan berfungsi sebagai penyedia sumber daya manusia yang kompeten, sedangkan pasar kerja merupakan pengguna tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan tertentu. Lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Namun, pada kasus Kota B terjadi kesenjangan antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Perguruan tinggi menghasilkan banyak lulusan, tetapi kompetensi yang dimiliki belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya pengangguran terdidik dan banyak lulusan bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Untuk meningkatkan relevansi lulusan

rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) perguruan tinggi perlu melakukan penyesuaian kurikulum secara berkala berdasarkan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
- 2) meningkatkan kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri melalui program magang, praktik kerja lapangan, dan pelatihan berbasis kompetensi
- 3) mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, serta literasi digital yang sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini.
- 4) memperkuat layanan bimbingan karier dan pelatihan kewirausahaan agar lulusan tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

## **Jawaban Soal Nomer 4**

**1.** Kenaikan uang kuliah 25% dapat dilihat dari dua sudut pandang. Sebagai barang privat, pendidikan memberi manfaat langsung kepada mahasiswa peningkatan pengetahuan, keterampilan, peluang kerja, dan pendapatan sehingga wajar jika mahasiswa menanggung sebagian biaya untuk peningkatan fasilitas dan layanan. Namun sebagai barang publik, pendidikan memberikan manfaat luas bagi masyarakat peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan kesempatan maka kenaikan biaya yang terlalu tinggi berisiko mengurangi akses bagi kelompok berpenghasilan rendah dan bertentangan dengan fungsi pemerataan. Oleh karena itu, meskipun peningkatan kualitas penting, universitas harus mempertimbangkan keadilan dan aksesibilitas agar pendidikan tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

**2.** Kenaikan biaya pendidikan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dari sisi ekonomi, biaya kuliah yang lebih tinggi meningkatkan beban keuangan keluarga, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah, sehingga dapat menyebabkan mahasiswa kesulitan membayar kuliah, bekerja sambil belajar, menunda studi, atau bahkan putus kuliah. Dari sisi sosial, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan akses pendidikan karena pendidikan tinggi menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menghambat mobilitas sosial, meningkatkan ketimpangan pendapatan, menurunkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat.

**3.** Pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap kenaikan biaya pendidikan karena pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan dan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Intervensi dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa, subsidi biaya kuliah, bantuan pendidikan, serta pengaturan kenaikan biaya agar tetap terjangkau. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga pemerataan akses pendidikan, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

## Jawaban Soal Nomer 5

1. Penerapan pembelajaran berbasis digital setelah pandemi bertujuan meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas proses belajar. Namun, bagi siswa dari keluarga kurang mampu, kebijakan ini menimbulkan tantangan karena mereka harus menyediakan perangkat seperti telepon pintar, laptop, serta kuota internet yang memadai. Dalam konsep biaya pendidikan, pengeluaran untuk membeli perangkat dan akses internet merupakan bagian dari biaya langsung (direct cost) yang harus ditanggung oleh keluarga agar siswa dapat mengikuti pembelajaran. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, biaya tersebut menjadi beban yang cukup besar sehingga menghambat akses mereka terhadap pendidikan. Selain itu, masalah ini juga dapat dianalisis menggunakan konsep opportunity cost (biaya peluang). Ketika keluarga harus mengalokasikan pendapatan untuk membeli perangkat dan kuota internet, mereka mungkin harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain yang sama pentingnya, seperti makanan, kesehatan, atau kebutuhan rumah tangga. Bahkan, beberapa siswa mungkin memilih untuk bekerja membantu ekonomi keluarga daripada mengikuti pembelajaran secara penuh karena keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, kesempatan memperoleh pendidikan yang optimal menjadi berkurang akibat adanya pilihan-pilihan ekonomi yang harus diambil oleh keluarga. Akibat tingginya biaya pendidikan digital dan besarnya biaya peluang yang harus ditanggung, partisipasi belajar siswa dari keluarga kurang mampu cenderung menurun. Mereka lebih sering mengalami keterlambatan mengumpulkan tugas, kesulitan mengikuti kelas daring, bahkan berisiko putus sekolah.

2. Kesenjangan digital adalah kondisi ketika terdapat perbedaan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi antara kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks pendidikan, kesenjangan digital dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan.

- 1) kesenjangan digital menyebabkan ketidakmerataan akses pembelajaran. Siswa yang memiliki perangkat dan internet memadai dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, sedangkan siswa yang tidak memiliki fasilitas tersebut mengalami hambatan dalam mengakses materi pelajaran.
- 2) kesenjangan digital dapat menurunkan hasil belajar dan prestasi akademik. Keterbatasan akses membuat siswa sulit memahami materi, berkurangnya interaksi dengan guru, serta minimnya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan digital yang dibutuhkan di era modern.
- 3) kesenjangan digital berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi di masa depan. Siswa yang tertinggal dalam pendidikan akan memiliki peluang yang lebih kecil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memperoleh pekerjaan yang berkualitas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan beberapa kebijakan yang tepat. Pemerintah dapat memberikan bantuan perangkat belajar seperti laptop atau tablet bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, perlu disediakan subsidi kuota internet atau akses internet gratis di sekolah dan ruang publik. Pemerintah juga perlu memperluas pembangunan infrastruktur jaringan internet hingga ke daerah terpencil agar seluruh siswa memiliki kesempatan yang

sama dalam mengakses pembelajaran digital. Di samping itu, sekolah dapat menerapkan sistem pembelajaran campuran (blended learning) yang menggabungkan pembelajaran digital dan tatap muka sehingga siswa yang memiliki keterbatasan teknologi tetap dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Dengan adanya dukungan kebijakan yang inklusif, kesenjangan digital dapat dikurangi sehingga seluruh siswa memperoleh akses pendidikan yang setara dan berkualitas, tanpa terhambat oleh kondisi ekonomi keluarga mereka.